



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : UNIT KHUSUS PEMBANGUNAN SPU, DC DAN BRS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDI HARYMUKTI
2. Jabatan : KEPALA UNIT KHUSUS
3. NHK : 260927

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 7.207.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 2.240.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 567.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.075.000.000

1. MOBIL, MERCEDES C200 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VOXY MPV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V HATCHBACK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.130.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 1.350.431

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.027.496.755

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 12.440.847.186

III. HUTANG

Rp. 1.430.244.724

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.010.602.462



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.